

## **BAB IV**

### **PEMIKIRAN POLITIK MOHAMAD ROEM DALAM KONTELASI PERPOLITIKAN DI INDONESIA (1945-1957)**

#### **A. Dasar Pemikiran Politik Mohamad Roem Dalam Kontelasi Perpolitikan di Indonesia (1945-1957)**

Masa muda mohamad roem diakhiri setelah hidupnya berkeluarga, dan menjadi seorang bapak. Begitu juga masa muda itu berlalu, setelah dimulainya kehidupan dalam masyarakat mengabdikan melalui keahlian yang dipelajari selama bersekolah sebagai ahli hukum. Dibukanya kantor advokat, pembela, dengan papan nama jabatannya “Mr. Mohamad roem “ di jakarta.

Sebelum berdiri secara penuh itupun, sesungguhnya telah ditempuhnya pula kegiatan bidang pekerjaan tersebut sewaktu dia masih menjadi mahasiswa, dan mengikuti team-team pembela dari partai syarikat islam dimuka pengadilan negeri. Ini berarti mohamad roem telah memilih jalan kehidupannya, berdiri berusaha sendiri, dan tidak pernah bekerja menjadi pegawai negeri pemerintahan kolonial belanda dan pemerintahan penduduk jepang. Dipilihnya peranan dan kesibukan yang dekat kepada rakyat, dekat

pada lingkungan pejuang-pejuang, dan bersimpati kepada mereka yang mengalami nasib kurang menyenangkan atau menderita.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan itu, mohamad roem yang tumbuh sebagai pemuda dengan segenap potensinya mulai tertarik untuk belajar berorganisasi melalui organisasi pemuda atau pelajar yang ada pada saat itu. Mohamad roem mulai belajar berorganisasi ketika ia melanjutkan studinya dari HIS di temanggung ke Stovia di jakarta 1924.

Menurutnya, radikalisme PSII dan gerakan lainnya harus dilihat dari konteks yang lebih luas. Sekitar Tahun 1920-an depresi ekonomi menyebabkan lahirnya perubahan kebijaksanaan pemerintah belanda. Menurunnya tingkat ekspor mendorong runtuhnya perusahaan-perusahaan barat. keadaan ini menyebabkan dilaksanakannya penghematan dana. Pajak ekspor dihapus, sementara pajak rakyat naik mencapai 34 juta gulden pada tahun 1925. Akibatnya, pengangguran meningkat dan menyebabkan tumbuhnya radikalisasi gerakan nasionalis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding* (jakarta: Bulan Bintang, 1978),...h.15.

<sup>2</sup> Yanto Bashir dan Retno Suffatni, *Sejarah tokoh bangsa*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2015),...h.225.

Perkumpulan pemuda dalam pergerakan Jong Java dan JIB mempunyai arti penting sebagai dasar perjuangan selanjutnya. Hal ini diakui sendiri oleh mohamad roem:

“Didalam pergerakan Jong Java dan JIB itu kami semua umumnya sudah menyadari bahwa dengan berorganisasi itu kami kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dikemudian hari. Waktu itu kaum terpelajar bangsa kita menyadari bahwa mereka mendapat kesempatan untuk maju. Karena itu, mereka harus mempunyai tekad untuk memimpin bangsanya yang masih sangat tertinggal di segala bidang kehidupan.”<sup>3</sup>

Dalam hiruk pikuk suasana gerakan nasionalisme ini Mohamad Roem muncul. Sebagai orang pilihan yang memiliki kesempatan mengecap dunia pendidikan suasana semacam itu sangat mempengaruhi persepsi mohamad Roem ketika berhadapan dengan kenyataan sosial politik bangsanya. Pilihan hidup yang dijalankannya kemudian, sebagaimana mohamad Roem yang dikenal sekarang, menunjukkan pengaruh suasana itu kedalam dirinya.

Mohamad roem tidak muncul sebagai tokoh nasionalis “sekular”, walau secara umum baik dengan Hatta, Soekarno, Ali

---

<sup>3</sup> In Isnawati, *Mohamad Roem Karier Politik Dan Perjuangan*, (Magelang: Indonesiatara, 2002),...h.19.

Sostroamidjojo, maupun Sjahrir memiliki persepsi yang sama tentang masa depan bangsanya. Pilihan afiliasinya pada kelompok gerakan nasionalis islam ditentukan oleh proses sosialisasi nilai yang berlangsung ketika Mohamad Roem masih kanak-kanak. Djulkarnaen Djojosasmito, ayah Mohamad Roem, menyerahkan pendidikan agama anak-anaknya kepada pak Wongso. Lewat kiyai inilah Mohamad Roem mempelajari Islam. Djulkarnaen sebagaimana diakui Mohamad Roem sebenarnya bukanlah seorang ahli agama bahkan dari berbagai segi menunjukkan adanya pembaruan antara nilai jawa dan Islam sehingga mempersulit memasukannya kedalam kelompok santri.

Tampaknya dalam konteks Haji Agus Salim inilah Mohamad Roem harus dipahami, yakni dalam sikap realistik dan berusaha berdialog dengan kenyataan. Interaksinya dengan Haji Agus Salim dipergunakan dengan baik untuk mengembangkan pribadinya. Rumusan pandangan realistik dituangkan dengan pembentukan pribadi yang bebas dan tidak terlalu terikat pada kelompok atau organisasi. Bentuk sikap seperti inilah yang kemudian menentukan putusan-putusan politik pribadinya.

Hubungan yang dekat antara Mohamad Roem dengan Haji Agus Salim sangat mempengaruhi langkah-langkah politik Mohamad Roem kelak dikemudian hari. Dalam hal ini Muhamad Roem pernah mengungkapkan pendapatnya tentang kedekatannya dengan Haji Agus Salim:

“Sebagai akibat yang tidak langsung kita berkenalan lebih rapat dengan penasehat JIB dan lain-lain pemimpin seperti namanya yang disebut diatas (Haji Agus Salim dan H.O.S Tjokroaminoto). Dengan sendirinya kita tertarik oleh perjuangannya. Meskipun mereka tidak langsung mengajak kita menurut jejak langkah mereka, tapi terutama pemimpin-pemimpin JIB melihat mereka dari dekat apa yang dikerjakan, apa yang artinya menjalankan tugas sebagai pemimpin umat.”

Dengan demikian kedekatan Mohamad Roem dengan Haji Agus Salim telah mendorongnya untuk berkiprah dalam PSII dan kemudian pergerakan penyadar yang dipimpin oleh Haji Agus Salim dan lain-lain.

Dampak perubahan kebijaksanaan ini mulai terlihat pada waktu Mohamad Roem menyelesaikan pendidikannya, baik di HIS, STOVIA, maupun AMS. Dampak tersebut memperlihatkan diri sebagaimana konsep Kahin. Mereka yang memperoleh pendidikan

Barat menyadari bahwa masa depan kemerdekaan politik Indonesia tidak akan dapat berarti jika tidak disertai dengan kemerdekaan ekonomi. Dalam pandangan masyarakat dimana Nonpribumi menguasai hampir seluruh modal bangsa, cita-cita Indonesia merdeka untuk menguasai kehidupan ekonomi menjadi sangat penting. Perasaan seperti ini muncul bersamaan dengan kurang terbukanya lapangan pekerjaan baik dikalangan terdidik maupun tidak sehingga menimbulkan kelompok elit yang frustrasi. Distriminasi kerjaan antara kelompok terdidik pribumi dan Belanda walau mempunyai Title dan keterampilan sama tetap berlangsung. Gejala-gejala ini merupakan bagian dari proses pembentukan nasionalisme indonesia.

Maka Mohamad Roem, selaku alumnus sekolah tinggi hukum (RHS) di jakarta, adalah seorang tokoh dengan perlengkapan untuk mampu memahami masalah –masalah modern sebuah negara, dan berkat perlengkapan itu ia tidak terdorong kepada praktek-praktek *sloganeering* guna mendukung kepemimpinannya.

Dalam suatu masyarakat yang masih tradisional, yang didominasi oleh kebutaan huruf rakyat, pendekatan-pendekatan “dingin” dan “teknokratis” gaya Mohamad Roem dan para

pemimpin sejenis memang tidak menarik orang banyak. Namun ia diibaratkan pondasi sebuah pencakar langit, yang tidak nampak mata karena terbenam jauh didalam tanah. Maka “pencakar langit” republik indonesia pun tidak bisa terbayangkan berdiri tegak tanpa batu-batu pondasi yang disambungkan oleh para pemimpin “pemecah masalah” seperti Mohamad Roem.

Menurut Muhammad Roem sesuai dengan perundingan di KMB yang membawa penyerahan dan pengakuan kedaulatan indonesia negara-negara di dunia seolah-olah berlomba mengakui indonesia. Dengan pengakuan itu, dirasakan perlunya formulasi politik luar negeri, terlebih PBB telah menerima indonesia sebagai anggotanya. Formulasi politik luar negeri itu adalah seperti di buat oleh Muhammad Roem, “politik bebas tidak tanpa batas dan aktif tidak immoral.” Pemikiran ini membuktikan bahwa Muhammad Roem termasuk tokoh yang memberi corak politik luar negeri yang bebas dan aktif.<sup>4</sup>

Dunia diplomasi bagi Muhammad Roem adalah suatu dunia yang tidak asing lagi. Sebelum indonesia merdeka, ia telah mulai menekuni bidang ini bersama H. Agus Salim yang juga seorang

---

<sup>4</sup> Nina Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005),...h.42.

politikus dan diplomat ulung, oleh Muhammad Roem dijadikan sebagai “guru” yang membimbingnya baik di bidang agama, politik, maupun diplomasi yang pada akhirnya membawa Muhammad Roem sebagai salah satu diplomat besar di asia.

Sekitar 20 partai politik islam yang ikut serta dalam pemilu demokratis ke dua pada tahun 1999. Dari jumlah tersebut hanya sepuluh partai yang meraih satu kursi atau lebih dalam parlemen. Kesepuluh partai islam itu yang meraih satu kursi atau lebih dalam parlemen. Kesepuluh partai islam itu meliputi PPP (58 kursi), PKB (51 kursi), PAN (34 kursi), PBB (13 kursi), PK (7 kursi), PNU (5 kursi), PP (1 kursi), PSII (1 kursi), PPI Masyumi (1 kursi), dan PKU (1 kursi). Disini hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa tanpa melihat kenyataan mayoritas indonesia beragama islam, partai-partai islam tetap tidak mapu menggalang dukungan mayoritas secara keseluruhan dalam pemilu kedua ini. Mereka hanya memperoleh 37.5% suara (172 kursi), termasuk PKB dan PAN, yang enggan di identifikasi sebagai partai islam tanpa kedua partai terakhir ini mereka hanya memperoleh 17.8% suara (87 kursi).

Gusdur adalah seorang yang memiliki paham kebangsaan yang tinggi, yang sangat cint terhadap tanah air dan bangsa



sehingga segala sesuatu yang dia perbuat demi kebutuhan bangsa indonesia. Berawal dari partai yang didirikan oleh gusdur yaitu partai kebangkitan bangsa yang sangat identik sekali akan paham kebangsaan yang diberi nama bukan atas nama islam (agamanya). Kemudian melalui partai tersebut gusdur menginginkan agar partai yang di dirikannya bisa di terima oleh seluruh komponen bangsa, yang tujuannya hanya semata-mata untuk keutuhan negara indonesia.

Dan Gusdur termasuk orang yang menghargai sejarah dari para tokoh terdahulu, kaitan antara Gusdur dengan Muhammad Roem terletak pada kebangsaan yang mereka miliki mengenai tata nilai yang terpenting dalam negara agar tercipta keutuhan dalam hidup bernegara sesama bangsa dan agama.

Kekuatan Gusdur di kalangan NU juga sebagai cucu dari pendiri partai NU, yakni Kiai Hasyim Asy'ari. Banyak para kiai yang mengatakan bahwa mereka sering bermimpi para leluhur muncul melindungi Gusdur pada saat-saat yang paling gawat. kemudian selain itu juga di dalam kalangan masyarakat tradisional juga berpendapat bahwa keturunan seorang yang luar biasa pasti juga memiliki sesuatu yang istimewa juga.

Pada tahun 1994, dengan terpilihnya kembali Gusdur sebagai ketua Tanfidziyah, dari kubu pembaruan NU telah membuktikan bahwa mereka bukanlah ciptaannya pihak penguasa sepuluh tahun lalu, melainkan memang merupakan jawaban atas kebutuhan nyata bagi masyarakatnya.

Kiprah NU dalam percaturan politik Indonesia pasca – Soeharto, harus diakui sangat mencengangkan. Puncaknya adalah dengan terpilihnya Gusdur sebagai presiden RI yang pada waktu itu masih menjabat sebagai ketua Tanfidziyah NU. Terpilihnya Gusdur sebagai presiden adalah merupakan buah kiprah dari politik NU sebagai jami'iyah keagamaan, dakwah, sosial dan pendidikan yang secara tidak resmi adalah keringat dari “sayap politik” NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Perjalanan Gusdur menuju RI terpilih karena berkah daripada reformasi hasil pemilu 1999 membuat partai Golkar tidak lagi sebagai kekuatan mayoritas dalam parlemen. Di antara kekuatan-kekuatan yang ada, naiknya Gusdur mengisyaratkan NU masih di pandang sebagai kekuatan yang signifikan. Padahal, akibat dibukanya keran demokrasi NU pun mengalami kegamangan ketika menghadapi arus kuat politik yang menyedotnya dan tak

terhindarkan, terjadilah gejolak dalam tubuh Nu sendiri. Seperti kita ketahui, bahwa pemilu 1999 memunculkan istilah-istilah telur dan kotoran ayam itu terlontar dari mulut Gusdur, akibat munculnya partai-partai NU di luar PKB, seperti PNU, PKU, dan partai Sunni.

Selain masalah internal tadi, kemampuan Nu merespon perkembangan politik di luar dirinya kembali menghadapi batu ujian. Pragmentasi sebuah politik nasional dan konflik berkepanjangan di antara elit politik nasional. Jelas posisi seperti ini membuat Nu semakin sulit untuk memilih bentuk respon yang di berikan baik secara nyata, maupun tersembunyi di sini terdapat perbedaan respon ketika berhadapan dengan dunia luar.

## **B. Peran Pemikiran Politik Muhammad Roem Dalam Kontelasi Perpolitikan di Indonesia Tahun 1945-1957**

### **1. Keberadaan Muhammad Roem dalam partai masyumi.**

Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 agustus 1945 telah memberikan kesempatan baru bagi warga dan rakyat indonesia untuk membentuk partai-partai politik sebagai sarana dan media penyaluran aspirasi. Pembentukan partai-partai politik ini adalah wujud dari demokratisasi yang di nyatakan dalam pasal 28 UUD 1945. Kesempatan ini tidak di sia-siakan oleh rakyat

Indonesia khususnya umat Islam. Maka pada tanggal 7-8 November 1945 melalui sebuah kongres umat Islam di Yogyakarta di bentuklah sebuah partai politik Islam dengan nama Masyumi. Tetapi tidak sama dengan Masyumi buatan Jepang, karena ia di bentuk dan didirikan oleh umat Islam sendiri tanpa campur tangan hak lain, sekalipun nama lama tetap di pakai. Dalam pengakuan Muhammad Roem ia sebetulnya tidak setuju dengan nama Masyumi itu karena kedengarannya berbau Jepang. Walaupun bisa di sesuaikan dengan singkatan yang di maksud (majlis syura muslimin Indonesia)<sup>5</sup>. Muhammad Roem dan H. Afus Salim mengusulkan nama “partai rakyat Islam”. Tetapi mereka berdua kalah suara dengan yang lainnya.

Di lihat dari sisi lain, munculnya Masyumi pada tahun 1945 dapat pula di pandang sebagai jawaban umat terhadap manifesto politik Muhammad Hatta tanggal 1 November 1945 yang mendorong pembentukan partai. Pemimpin-pemimpin umat memanfaatkan kesempatan baik seperti halnya golongan-golongan lain berbuat serupa. Dalam kepengurusan hasil kongres Masyumi bulan November tahun 1945 di Yogyakarta, lebih mewakili

---

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam, II* (Jakarta: Departemen Agama, IAIN Jakarta, 1987/1988),...cet ke-1.h. 61.

organisasi massa dan politik yang berasal dari jaman penjajahan. Ini mencerminkan juga kondisi masa itu, berupa kebulatan tekad untuk bersatu. Sekalipun organisasi islam sebelum perang menyokong masyumi, namun dukungan terbesar di berikan oleh NU dan Muhammadiyah. Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan federasi, di dalamnya terdapat anggota biasa (perorangan) dan anggota luar biasa (kolektif), seperti Muhammadiyah dan NU.

Hasil muktamar masyumi di yogyakarta Muhammad Roem dimasukkan anggota pusat masyumi padahal iya sebagai pendiri partai politik islam tersebut. Di tempatkannya ia sebagai anggota, karena ketika muktamar berjalan ia harus kembali ke jakarta. Dan beberapa hari di jakarta menjalankan tugas sebagai ketua komite nasional jakarta raya, tiba-tiba mengalami musibah di tembak oleh tentara belanda. Dengan demikian Muhammad Roem tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik tersebut.

Peranan politik Muhamma Roem dalam partai masyumi memang tidak seperti Muhammad Natsir dan Dr. Soekiman. Mereka berdua sama-sama tiga kali menjabat sebagai ketua partai masyumi pusat, sedangkan Muhamma Roem hanya anggota pusat, dan sekali menjabat sebagai wakil ketua II pada masa presiden

masyumi di pimpin oleh Dr. Soekiman pada tahun 1951 dan jabatan terakhirnya di partai masyumi menjadi wakil ketua III pada masa pimpinan Prawoto mangu Sasmito pada tahun 1959 setahun sebelum partai masyumi di bubarkan.

Di antara pengurus masyumi tahun 1945 yang tetap ikut menjadi pengurus pada periode selanjutnya adalah Muhamma Roem dan Prawoto Mangu Saswito. Kedudukan beliau dalam masyumi bersama-sama Muhamma Natsir, Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Jusup Wibisono, Dr. Abu Hanifah, Mr. Syaripudin Prawiranegara dan sebagainya. Karir yang di rintis melalui partai masyumi inilah yang mengantar menjadi negarawan yang di segani. Selain itu Muhammad Roem bekas seorang pimpinan pergerakan penyadar pada masa sebelum perang, berkali-kali duduk dala kabinet, baik pada masa revolusi maupun masa sesudahnya.

## 2. Kiprah Muhammad Roem Dalam Pemerintahan

Peran politik Muhammad Roem pada penanda tangan persetujuan Roem-Roeyen statement tanggal 14 april 1949 adalah sebagai ketua delegasi indonesia. Penanda tangan konferensi meja bundar di denhag pada tanggl 2 november 1949 sebagai wakil

ketua delegasi indonesia. Ia benar-benar memikul beban tugas yang di percayakan kepadanya sebagai seorang diplomat. Sebagai negarawan, ia pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan republik indonesia.<sup>6</sup> Di antaranya:

a. Sebagai menteri dalam negeri (1946-1947)

Waktu menjabat sebagai ketua umum partai masyumi, Dr. Soekiman tidak setuju kalau Muhammad Roem mewakili masyumi dalam kabinet RI, tetapi ia keberatan ikut serta sebagai perseorangan. Akhirnya Muhammad Roem juga menjadi menteri dalam negeri sebagai perseorangan. Sebaliknya, Syahrir duduk, mewakili partainya. Ini baru saja tiga bulan Muhammad Roem turut aktif dalam pengurus pusat masyumi di yogyakarta. Sudah harus melepaskan lagi, karena telah di angkat menjadi sebagai menteri dalam negeri dalam kabinet Syahrir yang ke III.

b. Sebagai ketua delegasi indonesia pada perundingan Roem-Roeyen (1949)

Sesudah agresi kedua, sikap dunia pada umumnya dan amerika serikat khususnya menghendaki indonesia-balanda di

---

<sup>6</sup> *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984),...h.2924-2925.

selenggarakan dengan cara yang damai tanpa ada korban jiwa. Roem-Roeyen statement yang di tanda tangani pada tanggal 6 juli 1949 dengan merealisasikan kembalinya presiden Soekarno dan wakil wakil presiden Muhammad Hatta ke yogyakarta. Muhammad Roem tidak turut serta dalam rombongan presiden tersebut, karena ia harus kembali ke jakarta untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan belanda kepada indoesia dalam waktu dekat.<sup>7</sup>

Penilaian seperti ini di sebabkan antara lain oleh tiga hal. *Pertama*, terdapat keyakinan bahwa persetujuan Roem-Roeyen itu terdapat pada saat perjuangan bersenjata kita, baik TNI maupun Laskar, sudah menempati yang memungkinkan mereka mengambil prakarsa untuk menyapu bersih kekuatan militer belanda. Kalau itu terjadi, maka ada alasan untuk berunding, dan belanda akan terpaksa menerima syarat-syarat yang di tunjukkan oleh Muhammad Roem. *Kedua*, persetujuan tersebut mengandung penerimaan bentuk federasi bagi negara indonesia. Dalam bentuk ini republik indonesia akan hanya merupakan negara bagian, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan negara-negara bagian lain ciptaan belanda.

---

<sup>7</sup> Mohamad Roem, *Diplomasi: Ujung tombak Perjuangan RI*, penyunting Kustianti Muchtar, (Jakarta: PT Gramedia, 1989),...cet.ke-9.h.14.



Dikalangan para pejuang indonesia, bentuk federasi ini benar-benar tidak populer, ia di anggap merupakan hasil usaha belanda memecah bangsa indonesia. Lagi pula, republik indonesia merupakan modal satu-satunya dalam mempertahankan kemerdekaan yang di proklamirkan tahun 1945. Modal ini tidak mungkin di samakan dengan negara-negara bagian yang lain buatan belanda. *Ketiga*, Muhammad Roem sebagai ketua delegasi indonesia mendapat dari Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak berfungsi lagi sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia karena memang berada dalam tahanan belanda. Pendapat ketiga ini lebih dapat menerima persetujuan itu bila Muhammad Roem mendapat mandat dari Syaripudin Prawiranegara, kepada pemerintah darurat republik indonesia. Bukankah para pemimpin indonesia yang sedang dalam tahanan belanda itu di bangka juga mengakui Syaripudin Prawiranegara yang berfungsi sebagai kepala pemerintah.

- c. Sebagai wakil ketua delegasi indonesia dalam konferensi meja bundar di den haag (1949)

Setelah pernyataan Roem-Roeyen, dewan perserikatan bangsa-bangsa mulai aktif melaksanakan tugasnya untuk

meletakkan prinsip-prinsip perdamaian yang telah di sepakati kedua belah pihak. Roem-Roeyen statement yang telah di tanda tangani dan di selesaikan akan di jadikan sebagai langkah awal pengunduran eluruh tentara belanda dari daerah istimewa yogyakarta. Memang perjanjian Roem-Roeyen membuka jalan bagi pulihnya kekuasaan dan kedaulatan republik indonesia. Karena perjanjian Roem-Roeyen ini akan di teruskan pada konferensi meja bundar di belanda. Dalam KBM tersebut Muhammad Hatta memimpin delegasi republik indonesia. Sementara Muhammad Roem di percaya menjadi wakil ketua. Sebelum keberangkatan delegasi indonesia untuk perundingan konferensi meja bundar di den haag, di bentuklah susunan delegasi indonesia. Sementara Muhammad Roem di percaya sebagai wakil ketua. Sebelum keberangkatan delegasi indonesia untuk eprundingan konferensi meja bundar di den haag, di bentuklah susunan delegasi indonesia ke den haag pada tanggal 24 juli 1949. Dalam penyusunan tersebut, Muhammad Hatta di daulat sebagai ketua delegasi dan wakilnya adalah Muhammad Roem.

d. Sebagai Menteri Luar Negeri (1950-1951)

Pada tanggal 22 Agustus 1950 presiden Soekarno menunjuk Muhamad Natsir dari partai Masyumi menjadi pormatur dalam pembentukan kabinet RI baru. Ketika Muhamad Natsir merumuskan pemerintahan Indonesia dari tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951 Mohamad Roem dipercayakan menjadi menteri luar Negeri.

Sebagai menteri luar negeri, Mohamad Roem segera menangani masalah perundingan dengan belanda tentang persoalan irian barat. Dalam usaha tersebut, Mohamad Roem mengalami kebuntuan, artinya tidak ada kejelasan tentang duduk persoalannya. Sebab persoalan irian barat adalah persalan yang rumit. Belanda sesungguhnya sudah merencanakan agar irian barat menjadi tempat penampungan bagi orang-orang Indonesia-Belanda. Oleh karena hal tersebut diatas, setiap ada persoalan yang muncul, Belanda selalu lebih dahulu berperan untuk mengulur-ulur waktu dalam proses penyelesaiannya. Selain dari pada itu juga Mohamad Roem berkesempatan berkunjung ke amerika serikat secara resmi, di Amerika Mohamad Roem memperoleh sambutan yang

mengesankan dari rekannya. Menteri luar Negeri AS waktu itu dijabat oleh Dean Acheson.

e. Sebagai wakil perdana Menteri (1956-1957)

Pada tanggal 3 Maret, residen memilih Ali Sastroamijoyo sebagai pormatur untuk menghadapinya, Masyumi menunjuk Prawoto, Mohamad Roem, Mulyanto, Jusuf Wibisono, Suchjar Tedja Kusuma, dan Pangeran Muhamad Nor.

Mohamad Roem memiliki peranan penting dalam kabinet tersebut sebagai wakil perdana menteri I dalam kabinet ARI. Maka setelah kabinet ARI bubar, maka selesailah peran politik Mohamad Roem dalam pemerintahan, dan ia aktif dalam sosial keagaam, ia duduk dalam Dewan eksekutif setelah Muktamar Alam Islami yang bertempat di Mina Saudi Arabia. Pada waktu itu Presiden Muktamar Alam Islami Ma'ruf Dawalibi bekas perdana menteri Siriya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, IAIN Jakarta, 1977/1988), ...h.619-621.

